



### **Hak cipta dan penggunaan kembali:**

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

### **Copyright and reuse:**

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

## BAB II KERANGKA TEORI

### 2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bisa memudahkan peneliti dalam menentukan langkah sistematis dalam menyusun penelitian. Dalam menyusun penelitian ini, terdapat tiga sumber penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai acuan dan pembanding dalam menyelesaikan penelitian ini. Penelitian tersebut, di antaranya adalah penelitian oleh Anisa Rizki Sabrina dari Universitas Gadjah Mada, penelitian oleh Giri Lumakto dan Ahma Syamsuddin, dan penelitian oleh Iveta Linina dan Velga Vevere. Berikut uraian dari masing-masing penelitian terdahulu:

**Penelitian terdahulu pertama** yang digunakan sebagai referensi dalam penelitian ini adalah jurnal yang ditulis oleh Anisa Rizki Sabrina, mengenai “Literasi Media dan Digital di Indonesia: Sebuah Tinjauan Sistematis”, yang dipublikasikan pada tahun 2018. Sabrina melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai pengaruh dan pentingnya literasi digital, serta cara untuk meningkatkan kemampuan literasi sebagai salah satu upaya menanggulangi hoaks di masyarakat (Sabrina, 2018).

Fokus permasalahan yang diteliti oleh Sabrina adalah tentang bagaimana kemampuan literasi digital dibutuhkan dalam upaya menanggulangi hoaks yang ada di media sosial. Dalam jurnal ini, Sabrina menggunakan metode *library research* untuk mengelola berbagai macam literatur yang dimiliki, seperti buku, jurnal, majalah dan literatur lainnya yang sesuai dengan topik penelitian.

Sabrina memilih metode *library research* karena penelitian ini akan menggabungkan hasil penelitian sebelumnya yang memiliki tema yang sama dengan hasil penelitian yang terbaru sehingga menghasilkan sebuah temuan yang baru dan sesuai dengan perubahan ekologi media saat ini. Kemudian, Sabrina menggunakan dua tinjauan pustaka utama dalam penelitiannya, yaitu Literasi Media oleh W. James Potter (2001) dan konsep mengenai Era Post-Truth.

Sabrina memaparkan bahwa penyebaran hoaks di media sosial Indonesia sudah semakin banyak dan tidak ada ujungnya karena selalu diproduksi secara

berulang-ulang dan disebarakan secara terus menerus hingga menjadi sebuah kebiasaan. Berdasarkan data dari Kemenkominfo yang dipaparkan oleh Sabrina dalam jurnalnya, diketahui bahwa saat ini Indonesia memiliki sekitar 800.000 situs yang terindikasi sebagai penyebar informasi palsu dan setiap tahunnya situs-situs tersebut terus meningkat jumlahnya.

Dalam hasil penelitiannya, Sabrina menemukan bahwa literasi digital merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan komunikasi khalayak karena tiga alasan. Pertama, adanya peningkatan yang semakin intens pada penggunaan media digital, khususnya media sosial dan internet. Kedua, saat ini masyarakat sudah memiliki ketergantungan dalam menggunakan situs mesin pencarian dan platform media sosial dalam mencari informasi, Terakhir, masyarakat memerlukan kemampuan spesifik untuk bisa menyeleksi informasi dari banyaknya sumber yang ada sehingga tidak terjebak dalam informasi yang salah.

Sabrina juga menjelaskan tujuan dari memiliki kemampuan literasi digital adalah untuk memberikan kontrol yang lebih pada khalayak dalam memaknai keseluruhan pesan yang tersebar di media digital, baik yang terlihat maupun tidak. Selain itu, perbedaan tingkat literasi yang dimiliki oleh setiap individu tentunya akan berdampak pada bagaimana individu dalam mengontrol setiap proses individu yang diterima.

Menurut Potter (2001) dalam jurnal yang ditulis oleh Sabrina, individu yang memiliki tingkat literasi media rendah akan cenderung langsung menerima makna pesan yang terlihat atau hanya nampak di permukaan, yang dibuat dan telah ditentukan oleh media. Sebaliknya, jika individu yang memiliki tingkat literasi media yang tinggi, maka individu tersebut akan secara aktif menggunakan kemampuan interpretasi yang dimiliki dan memiliki kontrol yang lebih dalam menyeleksi semua makna yang terdapat di dalam suatu pesan dan memilih pesan mana yang paling akurat dari beberapa sudut pandang yang jelas.

Sabrina juga menjelaskan bahwa literasi digital adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dunia digital, khususnya media sosial karena 97,4% masyarakat Indonesia menggunakan internet untuk mengakses media sosial. Namun, tidak semua individu memiliki kebijakan yang baik saat menggunakan

media sosial karena menilai dirinya memiliki hak untuk bebas berpendapat. Dari hal tersebut kemudian muncul fenomena kasus kebebasan berpendapat di media sosial yang tidak bertanggung jawab.

Selain itu, Sabrina juga menemukan bahwa literasi digital merupakan salah satu upaya untuk menangani peredaran hoaks di era *post truth*, ketika pemerintah, pemilik media, atau kelompok lainnya tidak dapat melakukan kontrol yang baik pada konten-konten di media sosial. Sabrina menjelaskan bahwa peran literasi digital dalam memberantas hoaks terletak pada sisi kemampuan kognitif yang dimiliki khalayak dalam proses verifikasi informasi.

Hasil kesimpulan dari jurnal penelitian yang ditulis oleh Sabrina ini menyatakan bahwa kemampuan literasi digital perlu ditingkatkan, sebagai salah satu solusi untuk mencegah penyebaran hoaks yang semakin banyak. Dengan literasi digital, individu akan memiliki keterampilan berpikir kritis dalam menggunakan media digital sehingga akan lebih peka dalam melakukan penyaringan informasi dan kecakapan dalam mengidentifikasi informasi yang akurat atau hoaks.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Anisa Rizki Sabrina ini dengan yang akan dilakukan oleh peneliti, terletak pada fokus penelitian yang dilakukan karena jurnal yang ditulis oleh Sabrina ini lebih berfokus pada peran literasi digital sebagai salah satu solusi untuk menanggulangi penyebaran hoaks di media sosial. Sedangkan, penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti akan berfokus pada dua aspek, yaitu peran literasi digital dan kemampuan berpikir kritis sebagai solusi untuk menanggulangi penyebaran hoaks. Selain itu, penelitian terdahulu pertama ini menggunakan metode library research untuk menjelaskan hasil penelitian yang dilakukan dengan mengombinasikan beberapa penelitian terdahulu serupa dengan kajian terbaru.

Relevansi penelitian terdahulu pertama ini dengan yang akan dilakukan sekarang adalah pada variabel yang diteliti, yaitu literasi digital sehingga penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam lagi mengenai pentingnya literasi digital di era digital.

**Penelitian terdahulu kedua** yang digunakan sebagai referensi dalam penelitian ini berasal dari jurnal yang ditulis oleh Giri Lumakto dan Ahmad Syamsuddin mengenai “Persepsi dan Prilaku Cek Fakta pada Penyuluh Agama Islam Kementerian Agama Republik Indonesia”, pada tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prilaku dan persepsi dari Penyuluh Agama Islam (PAI) dalam melakukan pengecekan fakta dan klarifikasi informasi kepada masyarakat di Indonesia yang mayoritas beragama islam (Lumakto & Syamsuddin, 2020).

Penelitian terdahulu kedua ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei melalui Google Form yang sebarakan melalui grup WhatsApp yang berisikan penyuluh KUA di seluruh Indonesia. Survei digunakan sebagai metode pengumpulan data karena Lumakto dan Syamsuddin ingin memberikan penjelasan secara deskriptif yang bersifat atributif dalam sebuah populasi.

Kemudian, Sampel yang digunakan oleh Lumakto dan Syamsuddin terdiri 425 responden yang berprofesi sebagai Penyuluh Agama Islam (PAI) yang tersebar di 102 kabupaten dan 26 Kota dengan rentang usia yang beragam. Selain itu, penelitian ini menggunakan dua teori dan konsep utama, yaitu hoaks dan *fact-checking*.

Dalam hasil penelitiannya, Lumakto dan Syamsuddin menemukan bahwa rata-rata responden dalam penelitian ini, yaitu Penyuluh Agama Islam, berada pada rentang usia Generasi X dan *baby Boomer*. Rentang usia ini berdampak pada preferensi dalam menggunakan platform media sosial. Responden dalam penelitian ini lebih memilih platform yang sudah populer, yaitu Facebook dan media sosial yang mudah digunakan, yaitu WhatsApp karena mayoritas responden survei ini merupakan *digital native*.

Rentang usia tersebut kemudian berkaitan dengan persepsi dan prilaku dari responden mengenai pengecekan fakta. Meskipun mayoritas dari responden penelitian ini setuju bahwa *fact-checking* merupakan suatu aktivitas yang penting, sebagian dari responden penelitian ini juga tidak mengetahui adanya situs-situs pengecekan fakta seperti Mafindo dan *Cekfakta.com* dan memilih untuk tidak menggunakan referensi ilmiah dan situs cek fakta sebagai salah satu aktivitas

pengecekan fakta yang mereka lakukan sebelum memberikan dakwah, ceramah, dan sejenisnya.

Kemudian, Lumakto dan Syamsuddin juga menjelaskan bahwa saat ini aktivitas pengecekan fakta telah menjadi fokus secara umum dan bukan hanya menjadi fokus untuk para jurnalis saja. Beberapa upaya telah dilakukan secara global, mulai dari inisiatif oleh negara, komunitas, korporasi, ataupun kultural sehingga saat ini aktivitas cek fakta dapat dilakukan oleh siapa saja, bahkan dari tingkatan rumah tangga hingga personal.

Hasil kesimpulan dalam jurnal penelitian terdahulu kedua ini adalah bahwa aktivitas *fact-checking* dipengaruhi oleh rentang usia seseorang. Responden yang berada di rentang usia Generasi X dan *Baby Boomer* cenderung tidak melakukan aktivitas *fact-checking* karena memiliki kecakapan teknologi yang kurang. Sebagian responden memandang aktivitas *fact-checking* sebagai suatu hal yang penting dalam mengecek informasi yang sedang beredar di media sosial. Kemudian, Lumakto dan Syamsuddin juga menyimpulkan bahwa sebagian responden memiliki pandangan bahwa buku, jurnal ilmiah, dan kanal pengecekan fakta bukanlah sumber verifikasi atau rujukan utama responden dalam melakukan pengecekan fakta.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Giri Lumakto dan Ahmad Syamsuddin dengan yang akan dilakukan oleh peneliti, terletak pada fokus penelitian yang dilakukan karena jurnal terdahulu kedua ini berfokus untuk mengetahui bagaimana perilaku dan persepsi dari Penyuluh Agama Indonesia (PAI) mengenai pengecekan fakta.

Relevansi penelitian terdahulu ini dengan yang akan dilakukan sekarang adalah pada teori dan konsep yang digunakan, yaitu memberikan gambaran mengenai penelitian kuantitatif mengenai perilaku pengecekan fakta dari berbagai usia.

**Penelitian terdahulu ketiga** yang digunakan sebagai referensi dalam penelitian ini adalah jurnal yang ditulis oleh Iveta Linina dan Velga Vevere mengenai “*Critical Thinking as Grounds of Socially Responsible Communication*” yang dipublikasikan pada tahun 2021. Linina dan Vevere melakukan penelitian ini

dengan tujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pembentukan berpikir kritis yang merupakan dasar dari tanggung jawab sosial saat berkomunikasi (Linina & Vevere, 2021).

Penelitian terdahulu ketiga ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei dengan bantuan kuesioner melalui Google Form. Metode survei dipilih untuk dapat mengukur kemampuan responden dalam mengevaluasi informasi secara kritis dan membuat keputusan yang bertanggung jawab secara sosial karena fokus dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara berpikir kritis dan tanggung jawab komunikasi.

Populasi yang digunakan oleh Linina dan Vevere berasal dari mahasiswa universitas Latvia yang berada di rentang usia 19 hingga 40 tahun. Seluruh kuesioner yang ada dikirimkan secara personal oleh Linina dan Vevere ke *e-mail* masing-masing responden dalam penelitian.

Dalam hasil penelitiannya, Linina dan Vevere menemukan bahwa sumber utama responden dalam memperoleh informasi adalah portal media daring yaitu mencapai 44%, diikuti dengan media sosial (36%), televisi (13%), informasi dari teman (5%), dan informasi dari sumber lainnya yang tidak teridentifikasi (2%). Selain itu, Linina dan Vevere juga menemukan bahwa sebanyak 58% memiliki lebih dari 3 akun sosial media.

Dari data yang telah diperoleh, Linina dan Vevere juga menemukan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini menilai diri mereka memiliki keterampilan dalam mengidentifikasi informasi mana yang benar dan salah. Dalam mengumpulkan data mengenai kemampuan identifikasi informasi ini, Linina dan vevere menggunakan skala likert dengan rentang penilaian 0 hingga 10. Hasil dari pengolahan data tersebut menunjukkan rata-rata nilai (*mean*) 7,22.

Linina dan Vevere menemukan bahwa terdapat hubungan atau korelasi yang lemah antara tingkat penilaian diri responden mengenai kemampuan mengidentifikasi informasi dengan faktor-faktor yang dapat memengaruhi kemampuan responden dalam mengenai hoaks. Dalam jurnal ini, Linina dan Vevere menemukan bahwa responden (mahasiswa Universitas Latvia) terlalu objektif dalam menilai kemampuan diri sendiri dalam mengidentifikasi informasi. Dari hasil

perhitungan korelasi yang dilakukan menunjukkan bahwa, semakin tinggi harga diri responden, maka akan semakin sedikit sumber informasi yang akan mereka gunakan.

Penelitian terdahulu ketiga ini juga menemukan bahwa sebanyak 60% dari responden penelitian setuju bahwa mereka biasanya membagikan berita ke media sosial tanpa mengetahui atau yakin atas kebenaran dari berita tersebut. Selain itu, sebanyak 86% responden dalam penelitian ini setuju bahwa penyalur hoaks harus bertanggung jawab atas penyebaran informasi yang telah dilakukan.

Kesimpulan dari jurnal penelitian yang ditulis oleh Linina dan Vevere menemukan bahwa mahasiswa Universitas Latvia memiliki permasalahan dalam melakukan penilaian diri yang terlalu objektif mengenai kemampuan mereka dalam mengenali informasi yang salah atau benar dan 60% responden juga setuju bahwa mereka membagikan informasi di media sosial tanpa mengetahui kebenaran atau fakta dari informasi yang dibagikan tersebut.

Linina dan Vevere juga menekankan bahwa dibutuhkan pengembangan keterampilan berpikir kritis bagi mahasiswa dan masyarakat agar dapat melakukan komunikasi yang bertanggung jawab secara sosial. Selain itu, peneliti dalam jurnal ini juga menyarankan bahwa saat ini dibutuhkan aturan etik mengenai penggunaan media sosial sehingga dapat mengurangi jumlah penyebaran informasi palsu di jejaring sosial.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Iveta Linina dan Velga Vevere ini dengan yang akan dilakukan oleh peneliti, terletak pada variabel yang diteliti. Dalam penelitian terdahulu ini, variabel yang diteliti adalah kemampuan berpikir kritis dan tanggung jawab komunikasi di media sosial.

Relevansi penelitian terdahulu ini dengan yang akan dilakukan sekarang adalah memberikan gambaran mengenai penelitian kuantitatif mengenai kemampuan berpikir kritis dengan metode survei.

Untuk mempermudah memahami korelasi mengenai penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan, maka peneliti merangkum ketiga penelitian terdahulu di atas pada Tabel 2.1, sebagai berikut.

Tabel 2. 1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

	<p><b>“Literasi Media dan Digital di Indonesia: Sebuah Tinjauan Sistematis”</b> Oleh Anisa Rizki Sabrina (2018)</p>	<p><b>“Persepsi dan Prilaku Cek Fakta pada Penyuluh Agama Islam Kementerian Agama Republik Indonesia”</b> Oleh Giri Lukmanto dan Ahmad Syamsuddin (2020)</p>	<p><b>“Critical Thinking as Grounds of Socially Responsible Communication”</b> Oleh Iveta Linina dan Velga Vevere (2021)</p>
Hasil Penelitian	<p>Penelitian ini menemukan bahwa literasi digital merupakan salah satu solusi untuk menanggulangi dan mencegah penyebaran hoaks yang semakin banyak di masyarakat. Dengan literasi digital, maka individu akan memiliki kemampuan berpikir kritis sehingga lebih peka dalam mengidentifikasi informasi yang diterima.</p>	<p>Penelitian ini menemukan bahwa rentang usia seseorang memengaruhi aktivitas <i>fact-checking</i>. Generasi yang lahir sebelum generasi milenial akan cenderung tidak melakukan pengecekan fakta karena tidak memiliki kemampuan berteknologi yang baik. Selain itu, kanal pengecekan fakta, jurnal ilmiah dan buku bukanlah sumber utama responden (PAI) dalam melakukan pengecekan fakta</p>	<p>Penelitian ini menemukan bahwa responden dalam penelitian ini (mahasiswa Universitas Latvia) memiliki permasalahan pada kemampuan mereka dalam menilai diri yang terlalu objektif mengenai kemampuan mengidentifikasi informasi. Selain itu, 60% responden cenderung membagikan informasi ke media sosial mereka tanpa mengetahui kebenaran fakta dari informasi tersebut sehingga dibutuhkan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis mereka.</p>
Relevansi Penelitian	<p>Melakukan penelitian mengenai literasi digital dan memberikan gambaran mengenai konsep literasi digital.</p>	<p>Menggunakan pendekatan kuantitatif dan memberikan gambaran mengenai prilaku pengecekan fakta dari berbagai rentang usia.</p>	<p>Menggunakan pendekatan kuantitatif dan memberikan gambaran mengenai penelitian dengan variabel kemampuan berpikir kritis.</p>

Sumber: Olahan Peneliti, 2021

## 2.2 Teori dan Konsep

### 2.2.1 Literasi digital

Menurut UNESCO, literasi digital merupakan kemampuan individu dalam mengakses, memahami, mengelola, mengintegrasikan, mengomunikasikan, mengevaluasi, dan menciptakan informasi secara bertanggung jawab yang didukung atau dilakukan dengan teknologi digital, baik itu ketika di lingkungan belajar, bekerja, maupun bersantai. Kemampuan

ini juga meliputi literasi komputer, literasi TIK, literasi informasi, dan literasi media (Law, et al., 2018, p. 7).

Konsep literasi digital dapat menjadi dasar penting yang menaungi kemampuan dalam memahami perangkat-perangkat digital, informasi, dan komunikasi (Law, et al., 2018, p. 7). Individu yang literat digital, akan memiliki kemampuan dalam memproses dan memahami berbagai informasi yang diterima, serta mampu berkomunikasi secara efektif dengan orang lain dalam berbagai bentuk (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017, p. 5).

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) juga menjelaskan bahwa literasi digital akan menciptakan sebuah tatanan masyarakat dengan pola pikir yang kritis sehingga masyarakat tidak akan mudah terperangkap dalam isu provokatif dan menjadi korban dari informasi hoaks atau pun penipuan berbasis digital (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017, p. 6).

UNESCO (Law, et al., 2018, pp. 23-24) membagi komponen kompetensi literasi digital ke dalam 7 aspek dan 26 indikator, yaitu sebagai berikut:

1) Mengoperasikan perangkat keras dan lunak

Kemampuan dalam mengidentifikasi dan menggunakan peralatan teknologi (*hardware*) dan mengidentifikasi data, informasi, dan konten digital yang diperlukan untuk mengoperasikan *software* digital.

2) Informasi dan literasi data

Kemampuan dalam menyimpan, mengelola, dan mengatur data informasi dan konten digital, serta menilai relevansi antara sumber dan isi.

3) Komunikasi dan kolaborasi

Kemampuan dalam berinteraksi, berkomunikasi dan berkolaborasi melalui teknologi digital dengan tetap menyadari keragaman budaya dan generasi, serta mengelola identitas dan reputasi digital yang dimiliki.

- 4) Pembuatan konten digital  
Kemampuan dalam membuat dan menyunting konten digital, serta memahami bagaimana hak cipta dan lisensi diterapkan terhadap suatu konten.
- 5) Keamanan  
Kemampuan dalam melindungi perangkat, konten, data pribadi dan privasi di lingkungan digital, serta menyadari dampak dari penggunaan teknologi digital.
- 6) Penyelesaian masalah  
Kemampuan dalam melakukan identifikasi terhadap kebutuhan dan masalah, menyelesaikan permasalahan di dalam lingkungan digital, menggunakan perangkat digital untuk berinovasi, dan tetap mengikuti perkembangan digital.
- 7) Kompetensi terkait karir  
Kemampuan dalam mengoperasikan teknologi digital khusus, memahami cara untuk menganalisis dan mengevaluasi data, informasi, serta data digital di bidang tertentu.

Tabel 2. 2 Dimensi dan Indikator Kemampuan Literasi Digital

No	Dimensi	Indikator
1	Mengoperasikan perangkat keras dan lunak	1. Mengoperasikan perangkat digital (fisik)
		2. Mengoperasikan <i>software</i> di dalam perangkat digital
2	Informasi dan literasi data	3. Menelusuri, mencari dan menyaring data, informasi, dan konten digital
		4. Mengevaluasi data, informasi, dan konten digital
		5. Mengelola data, informasi, dan konten digital
3	Komunikasi dan kolaborasi	6. Berinteraksi melalui teknologi digital
		7. Berbagi melalui teknologi digital
		8. Terlibat dalam kewarganegaraan melalui teknologi digital
		9. Berkolaborasi melalui teknologi digital
		10. Etika internet (Netiquette)
		11. Mengelola identitas digital
4	Pembuatan konten digital	12. Mengembangkan konten digital
		13. Mengintegrasikan dan mengelaborasi ulang konten digital
		14. Hak cipta dan lisensi
		15. Pemrograman
5	Keamanan	16. Melindungi perangkat digital
		17. Melindungi data pribadi dan privasi
		18. Melindungi kesehatan dan kesejahteraan

		19. Melindungi lingkungan
6	Penyelesaian masalah	20. Memecahkan masalah teknis
		21. Mengidentifikasi kebutuhan dan respons teknologi
		22. Kreatif dalam menggunakan teknologi digital
		23. Mengidentifikasi kompetensi kesenjangan digital
		24. Pemikiran Komputasi
7	Kompetensi terkait karir	25. Mengoperasikan perangkat digital khusus untuk pekerjaan tertentu
		26. Menafsirkan dan memanipulasi data, informasi dan konten digital untuk pekerjaan tertentu

Sumber: Law, et al., 2018, pp. 23-25

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, maka diketahui bahwa literasi digital merupakan kemampuan yang penting dan dibutuhkan di era digital saat ini, agar dapat mengerti bagaimana cara menggunakan teknologi dengan baik dan bijak. Salah satu manfaat dari individu yang literat digital adalah tidak mudah menjadi korban informasi hoaks ataupun penipuan berbasis digital lainnya.

Oleh karena itu, konsep literasi digital oleh UNESCO ini peneliti gunakan untuk mengukur seberapa tinggi tingkat kemampuan literasi masyarakat generasi milenial di Jabodetabek dan apakah terdapat pengaruh antara tingkat literasi digital dengan kemampuan verifikasi informasi.

Pada penelitian ini, peneliti hanya akan menggunakan 4 dari 7 dimensi yang ada, yakni mengoperasikan perangkat keras dan lunak, informasi dan literasi data, komunikasi dan kolaborasi, dan keamanan. Alasan peneliti hanya menggunakan 4 dimensi adalah untuk menyesuaikan target responden di dalam ini yang berada diposisi audiens yang menerima konten informasi, dan bukan sebagai pembuat informasi atau kreator.

### 2.2.2 Keterampilan Berpikir Kritis

Keterampilan berpikir kritis merupakan kemampuan individu dalam menganalisis sebuah gagasan dan memecahkan masalah dengan menggunakan penalaran yang logis. Kemampuan ini dapat dikembangkan melalui proses pendidikan dan dapat memengaruhi keberhasilan individu dalam kehidupan karena apa yang dipikirkan, berkaitan dengan apa yang sedang dikerjakan (Hidayah, Salimi, dan Susiani, 2017, pp. 128-129).

Sementara itu, Deswani (dalam Sari, 2019, p. 2) berpendapat bahwa berpikir kritis merupakan proses aktivitas mental seseorang yang terorganisasikan dan berperan dalam tahap mengidentifikasi sampai mengevaluasi sebuah informasi yang diterima.

Stefanie Cottrell menjelaskan bahwa pada dasarnya keterampilan berpikir kritis merupakan penalaran atau kemampuan yang berasal dari dalam diri seseorang. Penalaran yang ada meliputi 3 hal, yaitu memiliki alasan dalam meyakini dan menyadari terhadap apa yang dilakukan; mengevaluasi keyakinan dan tindakan yang dilakukan secara kritis; dan mampu menjelaskan alasan keyakinan pada tindakan yang dilakukan ke orang lain (Cottrell, 2017 p. 3).

Menurut Ennis (2016, p. 3), terdapat lima aktivitas utama yang dilakukan saat berpikir kritis, yaitu:

1) Memberikan penjelasan sederhana

Aktivitas ini meliputi kemampuan memfokuskan pertanyaan, menganalisis pertanyaan, bertanya, dan menjawab pertanyaan mengenai suatu penjelasan atau pernyataan yang diterima.

2) Memberikan argumentasi

Aktivitas ini meliputi kemampuan dalam mempertimbangkan apakah sumber informasi yang ada dapat dipercaya atau tidak, melakukan pengamatan dan pertimbangan terhadap hasil dari suatu laporan observasi.

3) Membuat kesimpulan

Aktivitas ini meliputi kemampuan dalam melakukan deduksi, induksi dan menentukan nilai pertimbangan.

4) Memberikan argumentasi lanjutan

Aktivitas ini meliputi kemampuan dalam mengidentifikasi istilah-istilah dan asumsi.

5) Mengambil keputusan dan tindakan

Aktivitas ini meliputi kemampuan dalam menentukan tindakan dan interaksi dengan orang lain.

Tabel 2. 3 Dimensi dan Indikator Berpikir Kritis

No	Dimensi	Indikator
1	Memberikan penjelasan	1. Fokus pada pertanyaan
		2. Menganalisis argumen
		3. Bertanya dan menjawab suatu pertanyaan
		4. Memahami dan menggunakan grafik dan matematika dasar
2	Memberikan argumentasi	5. Menilai kredibilitas sumber
		6. Mengobservasi dan menilai laporan observasi
		7. Menggunakan latar belakang pengetahuan
3	Membuat kesimpulan	8. Melakukan deduksi dan menilai deduksi
		9. Membuat dan menilai kesimpulan induksi
		10. Menjelaskan argumen dan inferensi
		11. Membuat penilaian terhadap pertimbangan
4	Memberikan argumentasi lanjutan	12. Mendefinisikan argumentasi dan memberikan penilaian
		13. Menangani kesesatan berpikir dengan tepat
		14. Menilai asumsi yang tidak disebutkan
		15. Berpikir dengan perandaian
		16. Menghadapi kekeliruan label
		17. Waspada dan memeriksa kualitas dari cara pikir mereka
		18. Menghadapi segala hal dengan santun
5	Mengambil keputusan dan tindakan	19. Menentukan tindakan dan interaksi terhadap orang lain

Sumber: Ennis, 2016, p. 3

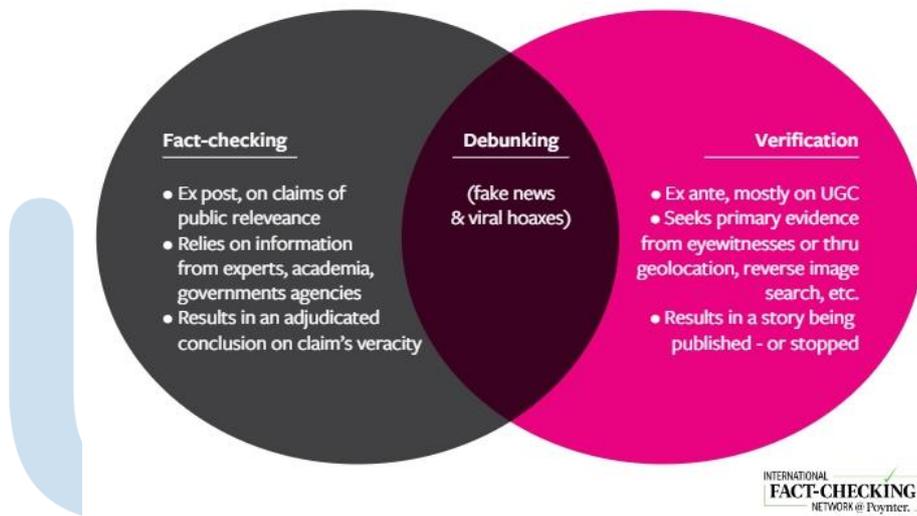
Berdasarkan pemaparan sebelumnya, maka diketahui bahwa kemampuan berpikir kritis merupakan kemampuan individu dalam menganalisis sebuah gagasan dan memecahkan masalah dengan menggunakan penalaran yang logis. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti menggunakan konsep berpikir kritis oleh Ennis untuk mengukur seberapa tinggi tingkat kemampuan berpikir kritis pada masyarakat generasi milenial di Jabodetabek dan apakah terdapat pengaruh antara tingkat kemampuan berpikir kritis dengan kemampuan verifikasi informasi.

### 2.2.3 Kemampuan Verifikasi Informasi

Dalam melakukan penyanggahan (*debunking*) terhadap sebuah informasi yang terindikasi hoaks atau palsu, individu dapat melakukan dua hal, yaitu pemeriksaan fakta (*fact-checking*) dan verifikasi. Pada dasarnya kedua kegiatan ini berbeda, tetapi memiliki tujuan yang sama yaitu membuktikan bahwa informasi atau berita yang sedang beredar tersebut adalah menyesatkan (UNESCO, 2019, p. 100).

*Fact-checking* merupakan sebuah kegiatan analisis yang harus dilakukan dengan cermat dan teliti karena praktik ini tidak memiliki panduan dasar khusus, seperti kamus atau buku yang memuat semua data dan fakta di dunia. Di era ini, *fact-checking* lebih berfokus pada klaim dan informasi yang sudah dipublikasikan (*ex-post*). Kegiatan ini bergantung pada informasi dari sejumlah ahli, akademisi, dan lembaga pemerintahan. Selain itu, hasil dari kegiatan *fact-checking* adalah berupa kesimpulan tentang kebenaran mengenai klaim yang ada (UNESCO, 2019, pp. 100-101).

Sementara itu, verifikasi merupakan kegiatan yang lebih berfokus pada konten-konten yang dihasilkan dan dibagikan melalui jejaring sosial oleh pengguna atau dikenal dengan *user-generated content* (UGC). Kegiatan verifikasi pada dasarnya melakukan penelusuran bukti primer melalui saksi mata, *geolocation*, *reverse image search*, dan alat penelusuran lainnya. Selain itu, hasil dari verifikasi adalah berupa penerbitan berita atau penghentian penyebaran informasi (UNESCO, 2019, pp. 116).



Gambar 2. 1 Perbedaan Fact-Checking dan Verifikasi  
Sumber: UNESCO, 2019

Selain itu, verifikasi informasi merupakan salah satu upaya utama untuk mengatasi penyebaran disinformasi dan misinformasi. Di era digital saat ini, oknum-oknum dengan kepentingan tertentu akan sangat mudah untuk membuat dan membagikan konten-konten dengan informasi palsu yang

meyakinkan dan sulit untuk dideteksi (UNESCO, 2019, p. 119). Saat ini, kegiatan verifikasi tidak lagi hanya dilakukan oleh ruang lingkup jurnalistik, tetapi khalayak umum juga telah terlibat secara aktif dalam melakukan verifikasi informasi (UNESCO, 2019, p. 117).

Pada penelitian ini, peneliti akan berfokus pada kegiatan verifikasi informasi pada khalayak karena berdasarkan penjelasan sebelumnya dapat diketahui bahwa kemampuan verifikasi informasi menjadi salah satu keahlian yang perlu dimiliki oleh masyarakat saat ini untuk dapat menyaring informasi yang diterima dan tidak mudah terjebak ke dalam informasi hoaks.

Tom Trewinnard dan Fergus Bell (UNESCO, 2019, p. 116) menjelaskan bahwa terdapat lima teknik penelusuran dasar dalam melakukan verifikasi informasi dan konten, yaitu

- 1) Melakukan identifikasi dan memberikan *credit* terhadap sumber asli yang digunakan. Hal ini sejalan dengan prinsip etis jurnalistik dalam menggunakan konten yang dibuat oleh pengguna (*user-generated content*).
- 2) Melakukan identifikasi dan mengabaikan akun palsu atau robot.
- 3) Melakukan konfirmasi bahwa konten visual yang ada telah diatribusi secara benar ke sumber aslinya.
- 4) Melakukan verifikasi waktu perekaman dan pengunggahan konten.
- 5) Melakukan penelusuran melalui geolokasi foto dan video.

Tabel 2. 4 Dimensi dan Indikator Kemampuan Verifikasi Informasi

No	Dimensi	Indikator
1	Identifikasi	1. Melakukan identifikasi dan memberikan <i>credit</i> terhadap sumber asli
		2. Melakukan identifikasi dan mengabaikan akun palsu atau robot.
2	Konfirmasi	3. Memastikan bahwa konten visual telah diatribusi secara benar dari sumber aslinya.
3	Verifikasi	4. Memastikan bahwa waktu perekaman dan pengunggahan konten sudah sesuai.
4	Penelusuran	5. Melakukan penelusuran melalui geolokasi foto dan video.

Sumber: UNESCO, 2019, p. 116

Berdasarkan hasil pemaparan sebelumnya, maka dapat diketahui bahwa verifikasi merupakan suatu kegiatan yang penting untuk menanggulangi

penyebaran hoaks di era digital sehingga kemampuan ini sangat dibutuhkan oleh setiap orang saat ini, agar dapat terhindar dari informasi hoaks.

Kemudian, peneliti akan mengadaptasi dan mengembangkan konsep mengenai verifikasi informasi dari UNESCO yang ditulis oleh Tom Trewinnard dan Fergus Bell sebagai dimensi dan indikator pertanyaan pada variabel kemampuan verifikasi informasi. Hal ini dilakukan karena saat penelitian ini dilakukan, peneliti belum menemukan penelitian terdahulu yang melakukan penelitian kuantitatif mengenai kemampuan verifikasi informasi.

#### 2.2.4 Information Disorder

*Information disorder* adalah istilah yang saat ini digunakan untuk menggantikan penggunaan berita palsu atau *fake news*. Claire Wardle dan Hossein Derakhshan menjelaskan bahwa penggunaan *fake news* saat ini perlu dihindari karena istilah tersebut tidak lagi merujuk pada informasi yang salah, menyesatkan, dan disebarluaskan sebagai berita, tetapi frase tersebut seringkali digunakan sebagai alat untuk merendahkan makna dari reportase media, terlebih jika terdapat pihak-pihak yang tidak menyukai pemberitaan tersebut. Oleh karena itu, istilah misinformasi dan disinformasi lebih disarankan penggunaannya dibandingkan *fake news* (UNESCO, 2019, p. 52).



Gambar 2. 2 Perbedaan Fact-Checking dan Verifikasi  
Sumber: UNESCO, 2019

Wardle dan Derakshan (UNESCO, 2019, p. 53) menjabarkan tiga kategorisasi dari kekacauan informasi, yaitu sebagai berikut.

1) *Misinformation* (misinformasi)

Misinformasi adalah informasi salah yang disebarakan oleh orang yang mempercayai apa yang ia sebarakan tersebut adalah informasi yang benar.

2) *Disinformation* (disinformasi)

Disinformasi adalah informasi salah yang disebarakan oleh orang yang sudah mengetahui bahwa apa yang ia sebarakan tersebut adalah informasi yang salah sehingga dapat diketahui bahwa disinformasi adalah kebohongan yang sengaja diciptakan untuk merugikan individu, kelompok, organisasi, atau pihak tertentu.

3) *Mal-information* (mal-informasi)

Mal-informasi adalah informasi yang disebarakan berdasarkan kenyataan dan benar, tetapi digunakan untuk merugikan dan menyakiti orang, organisasi, negara lain, atau pihak-pihak tertentu. Biasanya digunakan untuk mengancam keberadaan seseorang atau sekelompok orang dengan identitas tertentu.

Selain ketiga kategorisasi kekacauan informasi tersebut, dalam pemeriksaan fakta akan lebih diuntungkan jika dilakukan pembongkaran narasi. Kegiatan tersebut berfungsi untuk memeriksa struktur makna yang mencakup fakta dan non-fakta di dalam sebuah narasi yang disebarakan. Menurut UNESCO (UNESCO, 2019, pp. 56-58), terdapat tujuh jenis kesalahan informasi, yaitu sebagai berikut.

1) *Satire or Parody* (Satire atau Parodi)

Narasi yang ada tidak ada tujuan untuk menyakiti seseorang atau kelompok tertentu, tetapi tetap berpotensi untuk membodohi seseorang, sejalan dengan viralnya konten tersebut karena sebagian orang pasti akan mengalami kebingungan ketika tidak mengetahui bahwa konten tersebut bersifat satire atau sindiran. Terkadang satire dan parodi dapat dianggap sebagai bentuk seni.

2) *Misleading Content* (Konten yang Menyesatkan)

Narasi yang ada biasanya menggabungkan dua informasi yang benar, tetapi tidak saling berhubungan dengan tujuan untuk membuat pembaca bingung dan berpersepsi lain. Selain itu, konten yang dihasilkan sering disebut dengan *framing theory*, ketika terdapat penggunaan informasi yang menyesatkan untuk membingkai isu tertentu dengan cara memotong foto, atau memilih kutipan atau statistik secara selektif dan mengubahnya menjadi menyesatkan.

3) *Imposter Content* (Konten Tiruan)

Konten informasi yang ada sengaja dibuat dengan meniru konten asli dan mengubahnya menjadi menyesatkan atau direkayasa. Informasi yang ada dibuat berdasarkan hasil penyuntingan, tetapi menggunakan identitas organisasi media tertentu sehingga para pembaca akan mempercayai bahwa konten tersebut benar dan berasal dari organisasi media tersebut.

4) *Fabricated Content* (Konten Rekaan)

Konten informasi yang sepenuhnya dibuat tidak berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi dan sengaja dibuat untuk membohongi dan bukan untuk meniru.

5) *False Connection* (Hubungan yang Salah)

Konten yang dihasilkan biasanya saling tidak berhubungan. Salah satu contoh paling umumnya adalah berita *clickbait* ketika judul berita, visual, atau keterangan tidak mendukung konten yang bersangkutan.

6) *False Context* (Konteks yang Salah)

Ketika konten informasi yang tersebar tersebut memang benar adanya, tetapi konteks penyebaran dan penggunaannya tidak sesuai dengan informasi yang ada di dalamnya.

7) *Manipulated Content* (Konten yang Dimanipulasi)

Konten informasi yang ada sengaja dibuat dan dimanipulasi untuk membohongi atau menipu individu atau kelompok tertentu. Salah

satunya dengan melakukan penyuntingan terhadap gambar dan mengubah isi konten asli menjadi konten yang salah.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai *information disorder* atau kekacauan informasi, diketahui bahwa terdapat tiga kategori dan tujuh jenis kekacauan informasi yang dapat membantu aktivitas pengecekan fakta. Oleh karena itu, teori mengenai *information disorder* ini akan digunakan peneliti untuk memberikan konteks dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai jenis-jenis kekacauan informasi.

### **2.2.5 Generasi Milenial**

Menurut William Strauss dan Neil Howe, generasi milenial atau generasi Y adalah generasi yang lahir di antara tahun 1982-2000 (Badan Pusat Statistik, 2018, p.14). Generasi ini juga sering disebut sebagai *echo boomer* karena adanya peningkatan angka kelahiran yang besar pada rentang tahun generasi ini berada. Generasi milenial dilahirkan pada saat teknologi sedang berkembang sehingga generasi ini memiliki kemampuan untuk beradaptasi yang baik dengan teknologi, dibandingkan generasi sebelumnya. Secara umum, generasi milenial merupakan keturunan generasi *baby boomers* dan generasi X sehingga beberapa aktivitas yang dilakukan merupakan hasil kombinasi atau menirukan cara manual dari generasi X (Faiza & Firza, 2018, pp. 1-2).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh *Boston Consulting Group* (BCG) bersama dengan University of Berkley pada 2011 (dalam Badan Pusat Statistik, 2018, p.19), terdapat 4 karakteristik dari generasi milenial, yaitu sebagai berikut.

- 1) Memiliki minat membaca secara konvensional yang rendah karena generasi milenial ini lebih memilih membaca menggunakan perangkat elektronik seperti *smartphone*.
- 2) Wajib memiliki akun media sosial karena digunakan sebagai alat komunikasi dan pusat statistik.

- 3) Lebih memilih *smartphone* dibandingkan televisi untuk sarana hiburan.
- 4) Menjadikan keluarga sebagai pusat pengambilan keputusan dan pertimbangan.

Faiza dan Firza juga menjelaskan bahwa generasi milenial dikenal sebagai generasi yang lebih menyukai menghabiskan hampir separuh waktunya didepan *smartphone* yang dimiliki dan menjadikan internet sebagai sebuah kebutuhan sehari-hari. Generasi milenial juga memiliki tingkat rasa penasaran yang tinggi terhadap segala sesuatu yang sedang viral dan akan melakukan segala hal untuk mengatasi rasa penasaran tersebut (Faiza & Firza, 2018, pp. 3-4).

Berdasarkan teori mengenai generasi milenial yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat diketahui bahwa saat penelitian ini dilakukan, generasi milenial adalah orang-orang yang berada di rentang usia 21-39 tahun. Dengan kedekatan mereka dengan teknologi dan internet, maka kemungkinan untuk terpapar informasi hoaks melalui media daring cukup tinggi. Oleh karena itu, teori ini digunakan oleh peneliti untuk memberikan konteks dan penjelasan lebih mendalam mengenai karakteristik dan sifat dari generasi milenial, serta sebagai acuan dalam menentukan usia dari responden.

Selain itu, dikarenakan generasi milenial menyebar secara luas di Indonesia, penelitian ini akan berfokus pada generasi milenial yang ada di wilayah Jabodetabek (Jakarta-Bogor-Tangerang-Depok-Bekasi). Menurut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2020 dijelaskan bahwa wilayah Jabodetabek merupakan Kawasan Strategis Nasional yang terdiri atas kawasan perkotaan inti dan kawasan perkotaan sekitarnya yang membentuk kawasan metropolitan (Peraturan Presiden Republik Indonesia, 2020). Oleh karena itu, peneliti memilih wilayah Jabodetabek untuk mewakili kota-kota besar yang ada di Indonesia karena berdasarkan data dari Statistik Telekomunikasi Indonesia 2020, diketahui bahwa jumlah persentase pengguna internet Indonesia paling tinggi berada di wilayah perkotaan, yakni

mencapai 67%, sedangkan wilayah perdesaan hanya mencapai 33% (Badan Pusat Statistik, 2020).

### **2.3 Hipotesis Teoritis**

Berdasarkan rumusan masalah, teori yang ada, dan tujuan dari penelitian, yaitu untuk menguji ada atau tidaknya pengaruh antara variabel X1 yaitu kemampuan literasi digital dan X2 yaitu keterampilan berpikir kritis terhadap variabel Y yaitu kemampuan verifikasi informasi pada generasi milenial di Jabodetabek, maka hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini:

- 1) H01: Tidak terdapat pengaruh antara tingkat literasi digital terhadap kemampuan verifikasi informasi pada generasi milenial di Jabodetabek.  
Ha1: Terdapat pengaruh antara tingkat literasi digital terhadap kemampuan verifikasi informasi pada generasi milenial di Jabodetabek.
- 2) H02: Tidak terdapat pengaruh antara tingkat keterampilan berpikir kritis terhadap kemampuan verifikasi informasi pada generasi milenial di Jabodetabek.  
Ha2: Terdapat pengaruh antara tingkat keterampilan berpikir kritis terhadap kemampuan verifikasi informasi pada generasi milenial di Jabodetabek.
- 3) H03: Tidak terdapat pengaruh antara tingkat literasi digital dan keterampilan berpikir kritis terhadap kemampuan verifikasi informasi pada generasi milenial di Jabodetabek.  
Ha3: Terdapat pengaruh antara tingkat literasi digital dan keterampilan berpikir kritis terhadap kemampuan verifikasi informasi pada generasi milenial di Jabodetabek.

### **2.4 Alur Penelitian**

Berdasarkan pemaparan sebelumnya diketahui bahwa saat ini tingkat kebutuhan akan informasi sangatlah tinggi. Namun, tidak semua informasi yang disebarkan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan cenderung terindikasi sebagai hoaks. Hal tersebut sejalan dengan meningkatnya jumlah kasus

penyebaran hoaks di Indonesia. Salah satu upaya yang telah dilakukan untuk menanggulangi penyebaran hoaks telah dilakukan oleh beberapa organisasi media dan organisasi di Indonesia dengan menciptakan tim khusus pengecekan fakta. Namun, upaya tersebut belum dapat berjalan sepenuhnya karena sebagian masyarakat di Indonesia masih belum memiliki kemampuan yang cukup untuk membedakan dalam mengidentifikasi informasi yang diterima.

Center of Indonesian Policy Studies (CIPS) juga mengungkapkan bahwa kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia masih rendah dan salah satu penyebabnya adalah kurangnya kesadaran dalam menekankan keterampilan dalam berpikir kritis sejak dini. Dengan rendahnya kemampuan literasi digital dan keterampilan dalam berpikir kritis sejak dini, maka akan menyebabkan rendahnya kemampuan individu dalam menganalisis, mengevaluasi, dan membagikan informasi digital secara bertanggung jawab sehingga tingkat penyebaran informasi hoaks di Indonesia juga ikut meningkat (Hadyan, 2021).

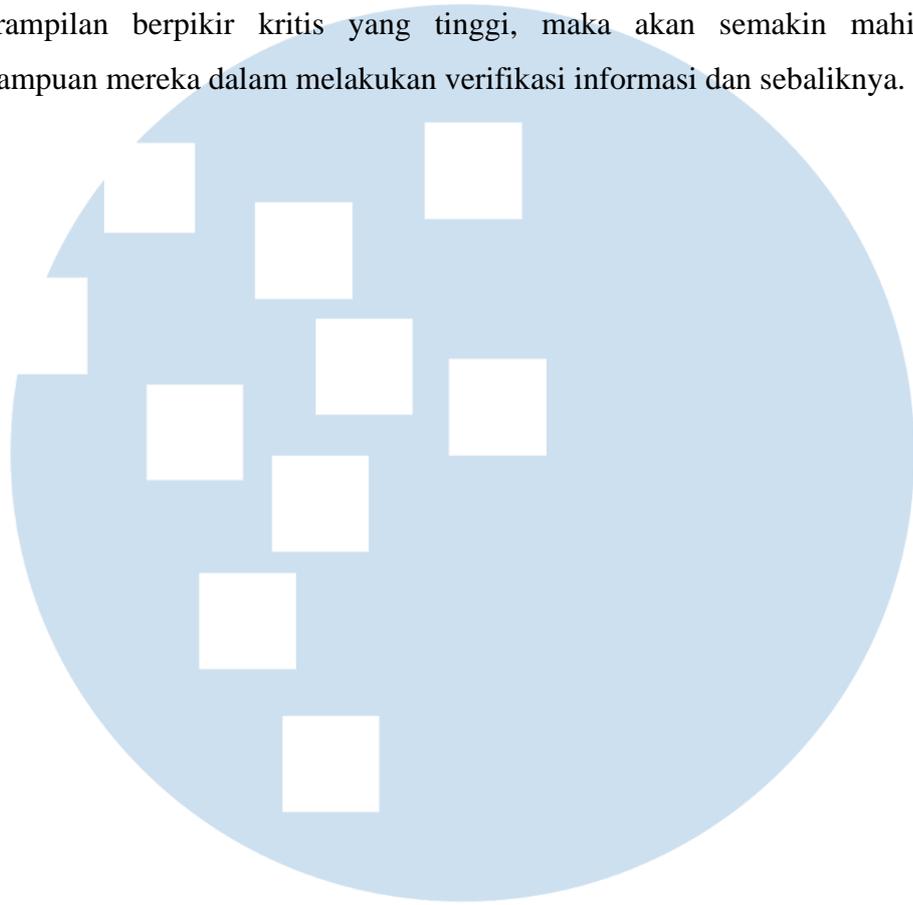
Penelitian ini akan menguji mengenai pengaruh tingkat literasi digital dan keterampilan berpikir kritis terhadap kemampuan verifikasi informasi pada masyarakat generasi milenial di Jabodetabek. Peneliti akan menggunakan 3 jenis alat ukur untuk mengukur setiap variabel penelitian yang ada.

Variabel X1 atau tingkat literasi digital akan menggunakan dimensi pengukuran dari UNESCO yang terdiri dari 5 dimensi, yaitu mengoperasikan perangkat keras dan lunak, informasi dan literasi data, komunikasi dan kolaborasi, pembuatan konten digital, dan keamanan.

Kemudian, untuk mengukur variabel X2 atau keterampilan berpikir kritis, peneliti akan menggunakan dimensi pengukuran dari Ennis (2016) yang terdiri dari 5 dimensi pengukuran, yaitu memberikan penjelasan, memberikan argumentasi, membuat kesimpulan, memberikan argumentasi lanjutan, dan mengambil keputusan dan tindakan. Lalu, untuk mengukur variabel Y atau kemampuan verifikasi informasi, peneliti akan menggunakan 5 dimensi pengukuran dari Tom Trewinnard dan Fergus Bell dari UNESCO.

Berdasarkan teori dan konsep yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti berasumsi bahwa apabila seseorang memiliki kemampuan literasi digital dan

keterampilan berpikir kritis yang tinggi, maka akan semakin mahir pula kemampuan mereka dalam melakukan verifikasi informasi dan sebaliknya.



# UMMN

UNIVERSITAS  
MULTIMEDIA  
NUSANTARA